

## SIARAN PERS

### **Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Belum Maksimal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

**Jakarta, 20 Juni 2024** — Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia<sup>1</sup>, yaitu 99.083 kilometer, dengan potensi kelautan yang luar biasa. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diolah oleh Badan Pusat Statistik, luas kawasan konservasi perairan Indonesia juga terus meningkat dari tahun ke tahun, mencapai lebih dari 28 juta<sup>2</sup> hektare pada 2022. Namun, di balik kekayaan sumber daya laut tersebut, daerah pesisir masih bergulat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Sekitar 1,3 juta jiwa atau 12,5%<sup>3</sup> dari 10,86 juta penduduk miskin di Indonesia tinggal di wilayah pesisir.

Situasi ini memerlukan solusi yang komprehensif. Upaya konservasi harus dipadukan dengan strategi yang mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi masyarakat pesisir untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Menyeimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat ini menjadi topik seminar **Forum Kajian Pembangunan (FKP) 2024 – Seri 1 “Mendorong Peningkatan Kesejahteraan di Kawasan Konservasi Perairan”** yang diselenggarakan secara daring oleh The SMERU Research Institute (SMERU) pada hari ini.

### **Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Perlu Mengarusutamakan Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

SMERU mengkaji pengelolaan kawasan konservasi di wilayah perairan dengan melihat kondisi serta tantangan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu temuannya adalah tingkat kemiskinan dan ketimpangan di desa dekat kawasan konservasi lebih tinggi dibandingkan desa nonkonservasi. Kajian SMERU juga menemukan bahwa pengelolaan kawasan konservasi secara terpusat menemui sejumlah kendala yang meliputi keterbatasan anggaran, wewenang (pemerintah daerah), dan sumber daya manusia serta minimnya partisipasi masyarakat.

Annabel Noor Asyah, peneliti SMERU yang terlibat dalam kajian tersebut mengatakan pemahaman pengelola kawasan konservasi tentang aspek sosial-ekonomi masih sangat terbatas. “Hal ini karena pengelola kawasan konservasi umumnya memiliki latar belakang teknis pengelolaan kelautan. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali pengetahuan mengenai aspek kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi,” terang Annabel.

Hal lain yang juga perlu disoroti adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 yang tidak lagi mencantumkan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu berbagai tantangan dalam penanganan masalah sosial-ekonomi di kawasan konservasi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir, pemerintah perlu mengarusutamakan aspek kesejahteraan masyarakat dalam setiap peraturan, perencanaan, penganggaran, implementasi, dan evaluasi kawasan konservasi.

<sup>1</sup> <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-by-coastline>, diakses 4 Juli 2023.

<sup>2</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/16/kawasan-konservasi-perairan-laut-indonesia-konsisten-naik-selama-8-tahun>

<sup>3</sup> <https://www.kominfo.go.id/content/detail/38902/pemerintah-targetkan-hapus-kemiskinan-ekstrem-di-wilayah-pesisir/0/berita>

### Ragam Upaya Mengatasi Tantangan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Dalam forum ini, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir. Andi Rusandi, M.Si., menyampaikan sejumlah tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, di antaranya peningkatan kebutuhan produksi protein karena ledakan penduduk, pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan domestik, dan meningkatnya jumlah sampah yang mencemari laut. Respons kebijakan untuk dua masalah pertama adalah pengembangan budidaya laut, pesisir, dan air tawar, sedangkan untuk sampah laut adalah penanganan sampah laut dengan nilai ekonomi sampah laut.

“Mengurangi kegiatan penangkapan ikan di laut akan menjaga populasi ikan dan hasil budidaya targetnya untuk peningkatan produksi perikanan pasar ekspor dan dalam negeri. Sementara, untuk mengurangi sampah laut hingga 70% pada 2030, Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat program-program, salah satunya Bulan Cinta Laut,” kata Andi.

Menurut kajian SMERU, tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir di kawasan konservasi perairan tidak selalu sama. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Imam Fauzi, S.S., M.Eng., yang memperlihatkan perbedaan target konservasi serta pemanfaatannya di beberapa kawasan konservasi yang masuk dalam wilayah kerjanya. “Masyarakat di tiap-tiap kawasan konservasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan perairan juga perlu memperhatikan faktor budaya lokalnya. Jika kita tidak memahami soal itu, program atau proyek peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tidak berjalan dengan optimal,” ujar Imam.

Pengelolaan kawasan konservasi di Kupang sendiri memiliki tiga pilar utama, yaitu pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan. “Jadi memang upaya-upaya ini tidak hanya bertujuan melestarikan lingkungan saja, tetapi juga harus berdampak bagi masyarakat di kawasan konservasi,” tambah Imam. Ia menekankan bahwa menjaga kawasan konservasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh pengelola, melainkan perlu dukungan kolaborasi banyak pihak, baik dalam perlindungan ekosistem perairan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi:

**Ratri Indah Septiana** (Kepala Bidang Komunikasi, The SMERU Research Institute)  
[rseptiana@smeru.or.id](mailto:rseptiana@smeru.or.id) | 08161361514

Materi presentasi para pembicara dapat diunduh di <https://smeru.or.id/id/event-id/mendorong-peningkatan-kesejahteraan-di-kawasan-konservasi-perairan>

---

#### **Tentang Forum Kajian Pembangunan (FKP)**

*FKP adalah forum tempat para peneliti, akademisi, pakar, masyarakat sipil, komunitas internasional, dan pembuat kebijakan bertemu dan mendiskusikan hasil studi tentang isu-isu kebijakan pembangunan terkini di Indonesia. FKP diselenggarakan oleh konsorsium berbagai organisasi yang bekerja sama dengan Indonesia Project dari Australian National University (ANU). Setiap bulannya, institusi yang tergabung dalam konsorsium FKP secara bergiliran menjadi tuan rumah untuk mengadakan seri seminar FKP. Pada Juni 2024, SMERU menjadi tuan rumah untuk dua seri seminar FKP dengan topik lingkungan hidup dan perubahan iklim.*

#### **Tentang The SMERU Research Institute (SMERU)**

*SMERU adalah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik. Sejak didirikan pada 2001, SMERU telah menjadi lembaga terdepan dalam melakukan kajian di bidang kemiskinan dan ketimpangan. SMERU juga berpengalaman dalam menjalankan penelitian kebijakan sosial dan ekonomi, termasuk kajian lingkungan hidup dan perubahan iklim dari perspektif kesejahteraan masyarakat. Informasi lebih lanjut tentang SMERU dapat dilihat di [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).*